



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYARIFAH MASITAH
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 800933

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.220.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 648 m2/480 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 239 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah Seluas 199 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 85.500.000

1. MOTOR, YAMAHA SKUTIK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, HONDA MOPEN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOTOR, HONDA SKUTIK Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 600.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 550.130.647**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 5.455.630.647



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.455.630.647

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.